



## **Pendekatan CEPA (Collaborative, Ecology, Planning, Administrative) dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai**

**Darmin**

**Widyaiswara BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan**

**Email: [darminhasbullah03@gmail.com](mailto:darminhasbullah03@gmail.com)**

### **ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran konseptual tentang pemberdayaan masyarakat pesisir dengan pendekatan CEPA. Proses pemberdayaan masyarakat melibatkan memberikan akses, pengetahuan, keterampilan, sumber daya, dan dukungan kepada individu dan komunitas agar mereka dapat mengambil peran aktif dalam mengatasi tantangan dan meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik di lingkungannya. Dalam konteks nelayan, pendekatan kolaboratif melibatkan kerjasama antara nelayan sendiri, pemerintah, peneliti, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Dengan memahami ekosistem secara menyeluruh, nelayan dapat membuat keputusan yang lebih bijak tentang waktu dan lokasi penangkapan ikan, serta mengurangi dampak negatif terhadap spesies dan habitat yang rentan. Pendekatan perencanaan dalam pemberdayaan nelayan melibatkan penggunaan metode dan proses perencanaan yang berfokus pada kebutuhan, partisipasi, dan penguatan nelayan sebagai pihak yang terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya perikanan dan pengembangan mata pencaharian mereka. Dengan menerapkan pendekatan administratif dalam pemberdayaan nelayan, dapat menciptakan kerangka kerja yang terstruktur, efisien, dan efektif dalam mendukung pengelolaan sumber daya perikanan, pengembangan mata pencaharian yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi nelayan.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan, Masyarakat Pesisir, Collaborative, Ecology, Planning, Administrative

## PENDAHULUAN

Masyarakat pesisir, yang sebagian besar adalah nelayan, tinggal di daerah pantai dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat di daerah lainnya karena mereka terkait erat dengan karakteristik ekonomi wilayah, budaya dan ketersediaan sarana serta prasarana penunjang. Umumnya, masyarakat pesisir memiliki budaya yang serasi dengan alam dan mengadopsi teknologi yang sesuai dengan kondisi pesisir. Namun, mereka juga memiliki tantangan seperti pendidikan yang rendah, produktivitas yang sangat dipengaruhi oleh musim, terbatasnya modal usaha, kurangnya sarana penunjang, mekanisme pasar yang kurang baik dan kesulitan dalam transfer teknologi dan komunikasi, yang mengakibatkan pendapatan mereka tidak menentu.

Masyarakat pesisir, umumnya bekerja sebagai nelayan yang artinya adalah mereka yang aktif menangkap ikan sebagai mata pencaharian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Definisi nelayan menurut buku statistik perikanan Indonesia adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan, binatang air lainnya, atau tanaman air. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Per.17/Men/2006 mendefinisikan nelayan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, sementara pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan budidaya ikan di perairan tawar, payau atau pantai. Nelayan tradisional adalah nelayan yang menggantungkan hidupnya sepenuhnya dari penangkapan ikan, dan mereka menggunakan alat tangkap yang sederhana secara turun-temurun (Indarti & Wardana, 2013).

Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa nelayan, menurut definisi di atas, merujuk pada individu yang melakukan pekerjaan yang terkait dengan memancing, seperti membuat jaring, mengangkut peralatan, dan menyeleksi ikan di atas kapal penangkap ikan. Namun, pekerjaan mereka dianggap sebagai aktivitas yang semata-mata berkaitan dengan pekerjaan tersebut dan tidak menggambarkan filosofi kehidupan nelayan, di mana sumber penghidupan mereka terletak di laut. Sebagai manusia yang memanfaatkan sumber daya laut, tindakan yang perlu

dilakukan adalah belajar melalui pengalaman dan penglihatan untuk menyesuaikan alat-alat dan teknologi yang digunakan dalam memancing agar sumber penghidupan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk kepentingan hidup di masa depan.

Laut memiliki ciri khas yang berbeda dengan unsur alam lainnya seperti tanah, udara, dan panas matahari. Perbedaan yang besar antara laut dan tanah memberikan kesempatan bagi manusia untuk mempelajari lebih dalam tentang laut dan mengaitkannya dengan udara dan panas matahari sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan. Selama berabad-abad, pengalaman yang diperoleh manusia telah memberikan pemahaman penting bahwa perlakuan terhadap laut dan tanah harus berbeda karena keduanya memiliki sifat alami yang berbeda. Hal ini mendorong manusia untuk beradaptasi dengan sifat alaminya. Sebagai akibat dari pemahaman akan sifat alam ini, manusia yang bergelut dengan laut menciptakan peralatan hidup utama seperti perahu, sementara mereka yang bergelut dengan tanah mengandalkan peralatan seperti bajak. Hal ini mencerminkan perbedaan dalam sikap hidup antara keduanya (Sutarto, 2018).

Dalam bidang pembangunan kelautan, kebijakan yang diterapkan selama ini cenderung lebih fokus pada peningkatan produksi dengan mengoptimalkan eksploitasi sumber daya laut tanpa mempertimbangkan kebijakan pengendalian yang memadai. Sampai sekarang, modernisasi di sektor perikanan hanya menguntungkan segelintir orang yang memiliki kekayaan dan kekuasaan politik. Oleh karena itu, perlu diadopsi paradigma alternatif dan strategi pembangunan yang holistik dan terintegrasi untuk menjaga keseimbangan antara produksi, pengelolaan, dan distribusi (Fitriansah, 2012).

Banyak program pemberdayaan saat ini yang mengklaim berdasarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat (bottom up), namun seringkali masyarakat tidak merasa memiliki program tersebut sehingga program tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah konsep pemberdayaan yang salah atau apakah pemberdayaan hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan dari segolongan orang

tertentu. Namun, memberdayakan masyarakat pesisir sebenarnya berarti memberikan kesempatan kepada mereka untuk menentukan kebutuhan mereka sendiri, merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat pesisir (Sufi, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, kajian ini akan memaparkan pendekatan yang dapat digunakan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir pantai, yaitu pendekatan CEPA (Collaborative, Ecology, Planning dan Administrative).

## **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR PANTAI**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemberdayaan memiliki akar kata dari "daya" yang mengacu pada kemauan bertindak atau kemampuan dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya, terdapat kata "berdaya" yang berasal dari "ber-daya" yang berarti memiliki kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan sendiri berasal dari kata "pem-ber-daya-an" yang menggambarkan suatu proses, cara, atau perbuatan dalam memberdayakan.

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai proses menswadayakan, memandirikan, mengembangkan, dan memperkuat posisi masyarakat terhadap segala aspek dan sektor yang dapat mengubah kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera (Gusti Ayu Yogi Iswari et al., 2019). Dengan mengacu pada pengertian tersebut, pemberdayaan dapat dipahami sebagai suatu proses menuju keberdayaan, yaitu proses untuk memperoleh daya, kekuatan, atau kemampuan, serta sebagai proses pemberian daya, kekuatan, atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum memiliki daya (Darmaningrum, 2021).

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat melibatkan memberikan akses, pengetahuan, keterampilan, sumber daya, dan dukungan kepada individu dan komunitas agar mereka dapat mengambil peran aktif dalam mengatasi tantangan dan meningkatkan kondisi sosial, ekonomi,

dan politik di lingkungannya. Pemberdayaan masyarakat juga berfokus pada memperkuat posisi masyarakat dalam menghadapi ketidakadilan, ketimpangan, dan penindasan dengan memberikan mereka kontrol atas sumber daya, keputusan, dan pengetahuan yang dapat meningkatkan keberdayaan mereka (Suwandi, 2020).

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, penting untuk mendorong partisipasi aktif dan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Proses ini mencakup pembangunan kapasitas individu dan kelompok, pengembangan kepemimpinan lokal, pemberian pendidikan dan pelatihan, penguatan ekonomi melalui pengembangan usaha mikro dan kecil, serta advokasi untuk perubahan kebijakan yang memihak kepada masyarakat. Dengan memperkuat masyarakat dan memberikan mereka kemampuan untuk mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan dan perubahan sosial, pemberdayaan masyarakat berpotensi menciptakan transformasi yang berkelanjutan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan.

## **PENDEKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR PANTAI**

Masyarakat pesisir pantai merupakan kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan laut atau lautan. Kehidupan dan mata pencaharian mereka sangat tergantung pada sumber daya alam yang ada di sekitar pesisir, seperti perikanan, pariwisata, pertanian, dan industri kelautan. Masyarakat pesisir pantai memiliki hubungan yang erat dengan ekosistem pesisir dan mengandalkan sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka (Nugroho, 2015).

Selain itu, masyarakat pesisir pantai juga memiliki kearifan lokal yang khas terkait pengelolaan sumber daya alam dan keberlanjutan ekosistem pesisir. Mereka telah mengembangkan pengetahuan dan praktik-tradisional dalam memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti sistem penangkapan ikan yang ramah lingkungan, penggunaan mangrove sebagai benteng alami melawan abrasi pantai, dan pengelolaan wilayah pesisir berbasis komunitas. Kehadiran masyarakat

pesisir pantai sebagai pemangku kepentingan utama juga penting dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan pesisir dan laut yang berkelanjutan.

Namun, masyarakat pesisir pantai juga menghadapi berbagai tantangan dan masalah. Mereka sering kali rentan terhadap dampak perubahan iklim, kerusakan lingkungan, degradasi habitat, dan konflik sumber daya. Kehidupan mereka juga terkadang dipengaruhi oleh kemiskinan, ketimpangan sosial-ekonomi, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan dasar. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat pesisir pantai secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan program pembangunan yang berdampak pada kehidupan mereka. Dengan memberdayakan masyarakat pesisir pantai melalui penguatan kapasitas, akses terhadap pendidikan dan keterampilan, serta partisipasi dalam pengelolaan sumber daya, kita dapat membangun masyarakat yang berkelanjutan dan tangguh di wilayah pesisir pantai (Prapti & Betiri, 2021).

Pemberdayaan masyarakat pesisir pantai adalah upaya yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Masyarakat pesisir pantai seringkali menghadapi tantangan yang unik, termasuk kerentanan terhadap bencana alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat pesisir pantai melibatkan memberikan mereka pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan untuk menghadapi tantangan tersebut secara berkelanjutan.

Salah satu aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat pesisir pantai adalah pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ini melibatkan pendekatan yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dan perlindungan sumber daya pantai, seperti perikanan, mangrove, dan habitat laut lainnya. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam praktik-praktik pengelolaan yang berkelanjutan, sehingga mereka dapat menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir pantai serta memperoleh manfaat ekonomi jangka panjang (Sjafari et al., 2018).

Selain itu, pemberdayaan masyarakat pesisir pantai juga melibatkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, memperoleh pendidikan yang bermutu, dan memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Hal ini akan memperkuat potensi masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi yang sering terjadi di daerah pesisir pantai.

Terakhir, pemberdayaan masyarakat pesisir pantai juga melibatkan penguatan kapasitas masyarakat dalam hal organisasi dan pengorganisasian. Dengan membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang kuat, seperti kelompok nelayan atau kelompok konservasi lingkungan, masyarakat dapat bekerja bersama-sama dalam menghadapi masalah dan mengambil keputusan yang berdampak positif bagi mereka. Penguatan kapasitas organisasi masyarakat juga dapat membantu mereka dalam mengadvokasi kepentingan mereka kepada pemerintah dan pihak terkait lainnya, serta memperoleh akses ke sumber daya dan program pembangunan yang relevan.

Secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat pesisir pantai melibatkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan pengelolaan sumber daya alam, akses terhadap layanan dasar, dan penguatan kapasitas organisasi masyarakat. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat pesisir pantai dapat mengatasi tantangan yang mereka hadapi, memperbaiki kondisi hidup mereka, dan menjadi agen perubahan yang berkelanjutan dalam mengelola dan melindungi lingkungan pesisir pantai yang berharga (Darmaningrum, 2021).

Dalam pemberdayaan masyarakat pesisir pantai, berbagai pendekatan dapat digunakan. Tulisan akan membahas secara ringkas tentang pendekatan Collaborative, Ecology, Planning, dan Administrative (CEPA) dalam pemberdayaan masyarakat pesisir pantai.

## 1. Pendekatan Collaborative (Kolaboratif)

Pendekatan kolaboratif mengacu pada pendekatan yang melibatkan kerjasama, keterlibatan aktif, dan interaksi antara berbagai pihak atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks nelayan, pendekatan kolaboratif melibatkan kerjasama antara nelayan sendiri, pemerintah, peneliti, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Pendekatan kolaboratif mengakui bahwa nelayan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam hal tangkapan ikan, ekosistem laut, dan praktik-praktik penangkapan ikan. Dengan melibatkan nelayan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi kebijakan pengelolaan perikanan, pendekatan kolaboratif memungkinkan penggabungan pengetahuan tradisional dan ilmiah untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Dalam pendekatan kolaboratif, pihak-pihak yang terlibat saling berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman mereka, serta bekerja bersama untuk mencari solusi yang efektif dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan perikanan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan, melindungi mata pencaharian nelayan, memperbaiki kondisi ekonomi, dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Pendekatan kolaboratif mempromosikan keterlibatan aktif, komunikasi terbuka, kepercayaan, dan kerjasama antara semua pihak yang terlibat, dengan tujuan akhir mencapai pengelolaan perikanan yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pendekatan kolaboratif dalam konteks nelayan melibatkan kerja sama dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak terkait dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan nelayan. Dalam pendekatan ini, nelayan dianggap sebagai mitra yang memiliki pengetahuan lokal yang berharga dan memiliki kepentingan langsung dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Kolaborasi antara nelayan, pemerintah, lembaga riset, LSM, dan pemangku kepentingan

lainnya memungkinkan adanya dialog terbuka, pertukaran pengetahuan, dan pemecahan masalah bersama untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan.

Dalam pendekatan kolaboratif, nelayan memiliki peran aktif dalam mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Mereka terlibat dalam pengawasan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas penangkapan ikan serta melakukan tindakan konservasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekologi. Dengan berkolaborasi, nelayan dapat berbagi pengetahuan mereka tentang siklus musim, pola migrasi ikan, dan kondisi ekosistem laut yang membantu dalam pengambilan keputusan yang berkelanjutan (Indarti & Wardana, 2013).

Pendekatan kolaboratif juga memungkinkan adanya pembangunan kapasitas bagi nelayan. Melalui pelatihan, pendidikan, dan pertukaran pengetahuan, nelayan dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, serta diversifikasi mata pencaharian. Dengan memperkuat kapasitas nelayan, mereka dapat menjadi pelaku utama dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan memperbaiki kesejahteraan mereka.

Secara keseluruhan, pendekatan kolaboratif dalam konteks nelayan memungkinkan adanya kerja sama yang harmonis antara nelayan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini membuka peluang untuk membangun kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, melindungi mata pencaharian nelayan, serta menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Kolaborasi ini juga mendorong partisipasi aktif nelayan dalam proses pengambilan keputusan, memperkuat keterampilan dan kapasitas mereka, serta menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh komunitas nelayan (Sufi, 2019).

Nelayan bersama-sama dapat melakukan kolaborasi untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan mereka dan keberlangsungan hidup mereka. Dengan bekerja sama, nelayan dapat berbagi pengetahuan dan teknik tangkap ikan yang lebih efektif, berbagi peralatan dan sumber daya, dan bahkan membentuk kelompok

penangkapan ikan yang dapat mengurangi persaingan di antara mereka dan mengambil keuntungan dari skala ekonomi. Selain itu, dengan bergabung ke dalam kelompok atau asosiasi, nelayan dapat melakukan advokasi politik untuk memperjuangkan kepentingan mereka di lembaga pemerintah dan masyarakat luas. Kolaborasi di antara nelayan dapat membantu meningkatkan kemakmuran dan kemandirian mereka, serta memastikan keberlangsungan sumber daya laut dan kesejahteraan ekosistem laut jangka panjang.

## **2. Pendekatan Ecology (Ekologi)**

Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme hidup dan lingkungan fisik serta organisme lain di sekitarnya. Secara lebih spesifik, ekologi mempelajari distribusi dan kelimpahan organisme, hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungannya, serta proses-proses yang mengatur ekosistem.

Ekologi melibatkan pemahaman tentang bagaimana organisme beradaptasi terhadap lingkungannya, bagaimana mereka saling bergantung satu sama lain dalam jaring makanan dan hubungan simbiosis, serta bagaimana energi dan materi bergerak melalui ekosistem dalam siklus biogeokimia. Ilmu ini juga mempelajari perubahan ekologi dari waktu ke waktu, termasuk interaksi antara manusia dan lingkungan alam (Utina, 2012).

Tujuan utama ekologi adalah memahami pola dan proses yang mengatur kehidupan di Bumi serta mengidentifikasi cara-cara untuk mempertahankan keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Dengan memahami ekologi, kita dapat mengembangkan strategi pengelolaan yang berkelanjutan, memprediksi dan merespons perubahan lingkungan, dan menghargai pentingnya keseimbangan alam dalam menjaga kehidupan di planet ini.

Pendekatan ekologi merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada pemahaman dan pengelolaan ekosistem secara menyeluruh. Pendekatan ini mengakui bahwa semua komponen dalam suatu ekosistem saling terkait dan saling memengaruhi, sehingga perubahan pada satu komponen dapat berdampak pada keseluruhan ekosistem. Dalam pendekatan ekologi, penting untuk memahami

dinamika populasi, interaksi antarspesies, siklus nutrisi, dan proses ekologis lainnya dalam suatu ekosistem. Pendekatan ini mempertimbangkan aspek lingkungan, termasuk faktor fisik, kimia, dan biologis, serta mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya dalam pengambilan keputusan pengelolaan lingkungan (Sufi, 2019).

Pendekatan ekologi juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan fungsi dan peran setiap organisme dalam ekosistem, serta memahami dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem. Pendekatan ini mendorong penggunaan praktik pengelolaan yang berkelanjutan, seperti penggunaan sumber daya alam dengan bijak, perlindungan habitat penting, dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan mengadopsi pendekatan ekologi, kita dapat meminimalkan kerusakan lingkungan, menjaga keberlanjutan ekosistem, dan memastikan kelangsungan hidup bagi semua makhluk hidup di bumi (Hafsaridewi et al., 2019).

Selain itu, pendekatan ekologi juga menekankan pentingnya melihat ekosistem sebagai suatu kesatuan yang kompleks dan dinamis. Hal ini berarti memahami pola-pola alami, interaksi antarkomponen, dan perubahan jangka panjang dalam ekosistem. Pendekatan ini mendorong penggunaan pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem, di mana keputusan pengelolaan didasarkan pada pemahaman menyeluruh tentang hubungan antara manusia dan lingkungan alam. Dengan mengadopsi pendekatan ekologi, kita dapat mencapai pengelolaan yang berkelanjutan, mengurangi risiko kerusakan ekosistem, dan memastikan kelestarian sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Pendekatan ekologi bagi nelayan melibatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ekologi dalam kegiatan penangkapan ikan dan pengelolaan sumber daya perikanan. Dalam konteks ini, pendekatan ekologi memberikan pandangan yang holistik tentang interaksi antara nelayan, ikan, dan lingkungan perairan.

Pertama, pendekatan ekologi bagi nelayan melibatkan pemahaman tentang ekosistem perairan tempat mereka beroperasi. Nelayan perlu memahami dinamika perairan, seperti ketersediaan sumber daya, siklus reproduksi ikan, dan pola migrasi. Dengan memahami ekosistem secara menyeluruh, nelayan dapat membuat keputusan yang lebih bijak tentang waktu dan lokasi penangkapan ikan, serta mengurangi dampak negatif terhadap spesies dan habitat yang rentan.

Kedua, pendekatan ekologi mendorong nelayan untuk mengadopsi praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan. Ini melibatkan penggunaan alat tangkap yang selektif dan ramah lingkungan untuk mengurangi tangkapan sampingan yang tidak diinginkan dan menjaga keanekaragaman hayati perairan. Nelayan juga dapat menerapkan praktik-praktik penangkapan yang tidak merusak habitat penting, seperti penangkapan ikan berdasarkan musim dan ukuran yang tepat.

Selain itu, pendekatan ekologi bagi nelayan juga melibatkan kolaborasi dengan ilmuwan, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dalam upaya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Nelayan dapat berpartisipasi dalam survei dan pemantauan sumber daya perikanan, berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka, serta berkontribusi dalam pengembangan kebijakan dan tindakan pengelolaan. Pendekatan kolaboratif ini memastikan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan didasarkan pada pemahaman ilmiah dan pengalaman praktis nelayan, sehingga menciptakan pengelolaan yang lebih efektif dan adil.

Dengan mengadopsi pendekatan ekologi, nelayan dapat menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan mempertahankan ekosistem laut yang sehat. Pendekatan ini membantu nelayan dalam membangun mata pencaharian yang berkelanjutan, melindungi sumber daya yang mereka andalkan, dan memastikan kelangsungan hidup ekosistem perairan bagi masa depan.

### **3. Pendekatan Planning (Perencanaan)**

Perencanaan adalah proses sistematis yang melibatkan penentuan tujuan, identifikasi tindakan yang diperlukan, alokasi sumber daya, serta pengembangan

strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk merumuskan langkah-langkah yang akan diambil guna mencapai hasil yang diinginkan dalam waktu yang ditentukan.

Perencanaan melibatkan penilaian yang cermat terhadap situasi dan kondisi saat ini, identifikasi tujuan yang jelas, dan pemikiran yang sistematis tentang cara mencapai tujuan tersebut. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis data, pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang tersedia, serta pengembangan rencana tindakan yang terstruktur.

Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai konteks, seperti perencanaan bisnis, perencanaan pengembangan kota, perencanaan proyek, perencanaan pendidikan, dan banyak lagi. Tujuan perencanaan adalah untuk mengarahkan upaya manusia, sumber daya, dan waktu ke arah pencapaian hasil yang diinginkan.

Dalam perencanaan, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor seperti tujuan, kebutuhan, sumber daya yang tersedia, kendala, serta lingkungan dan kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan rencana. Perencanaan yang efektif memungkinkan pengaturan prioritas yang tepat, alokasi sumber daya yang efisien, dan pengelolaan risiko yang baik untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pendekatan perencanaan dalam pemberdayaan nelayan melibatkan penggunaan metode dan proses perencanaan yang berfokus pada kebutuhan, partisipasi, dan penguatan nelayan sebagai pihak yang terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya perikanan dan pengembangan mata pencaharian mereka (Sutarto, 2018). Berikut ini beberapa aspek pendekatan perencanaan dalam pemberdayaan nelayan:

1. Partisipasi nelayan: Pendekatan perencanaan yang partisipatif melibatkan nelayan dalam setiap tahap perencanaan, mulai dari pengumpulan informasi hingga pengambilan keputusan. Nelayan diberi kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka, serta berkontribusi dalam merumuskan tujuan, strategi, dan tindakan yang relevan dengan kondisi dan

kebutuhan mereka. Partisipasi nelayan dalam perencanaan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan dan kebutuhan mereka.

2. Pendekatan berbasis ekosistem: Perencanaan pemberdayaan nelayan juga harus mencakup pemahaman yang baik tentang ekosistem perairan tempat nelayan beroperasi. Ini termasuk pemahaman tentang ketersediaan sumber daya perikanan, pola migrasi ikan, serta interaksi antara spesies yang berbeda dalam ekosistem tersebut. Dengan memahami ekosistem secara menyeluruh, perencanaan dapat diarahkan pada langkah-langkah pengelolaan yang berkelanjutan dan menjaga keseimbangan ekosistem, sekaligus memperhatikan mata pencaharian nelayan.
3. Pendekatan lintas sektor dan kemitraan: Pemberdayaan nelayan juga melibatkan kerjasama antara nelayan, pemerintah, lembaga penelitian, dan organisasi non-pemerintah. Pendekatan ini memungkinkan penggabungan pengetahuan dan keahlian dari berbagai sektor untuk mencapai tujuan bersama. Melalui kemitraan ini, perencanaan dapat melibatkan berbagai perspektif dan sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan rencana tindakan yang efektif.

Dengan menggunakan pendekatan perencanaan yang melibatkan partisipasi nelayan, pemahaman ekosistem, dan kemitraan lintas sektor, pemberdayaan nelayan dapat tercapai dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan nelayan untuk memiliki kendali atas pengelolaan sumber daya perikanan yang mereka andalkan dan untuk mengembangkan mata pencaharian yang berkelanjutan, melindungi keanekaragaman hayati perairan, serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka (Prapti & Betiri, 2021).

#### **4. Pendekatan Administrative (Administrasi)**

Administratif merujuk pada hal-hal yang terkait dengan administrasi atau pengelolaan tugas-tugas dan proses administrasi dalam suatu organisasi, lembaga, atau sistem. Secara umum, administratif berkaitan dengan aktivitas dan kebijakan

yang terkait dengan pengaturan, pengorganisasian, dan pengendalian berbagai aspek operasional dan manajerial dalam sebuah entitas.

Secara lebih khusus, administratif mencakup tugas-tugas seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian aktivitas sehari-hari dalam suatu organisasi. Ini melibatkan pembuatan keputusan, alokasi sumber daya, pengelolaan data dan dokumentasi, komunikasi internal dan eksternal, serta pemantauan kinerja dan pelaporan. Dalam konteks pemerintahan, administratif berkaitan dengan kegiatan dan proses yang terkait dengan pengaturan dan pengelolaan urusan publik, pelaksanaan kebijakan publik, administrasi kepegawaian, pengaturan administrasi dan regulasi, dan pengelolaan administrasi keuangan.

Pemahaman yang baik tentang aspek administratif menjadi penting dalam pengelolaan yang efisien dan efektif dalam organisasi atau lembaga. Hal ini melibatkan kemampuan untuk mengelola sumber daya secara efektif, menjalankan proses administrasi yang terstruktur, mengoordinasikan aktivitas, dan memastikan kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku (Sufi, 2019).

Pendekatan administratif dalam pemberdayaan nelayan melibatkan penggunaan prinsip-prinsip administratif dan manajerial dalam rangka memperkuat kapasitas dan pengelolaan nelayan sebagai individu atau kelompok (Sutarto, 2018). Berikut adalah beberapa aspek pendekatan administratif dalam pemberdayaan nelayan:

1. Pengorganisasian kelompok nelayan: Pendekatan administratif melibatkan pembentukan kelompok atau organisasi nelayan yang terstruktur dengan tujuan yang jelas. Ini dapat melibatkan proses pembentukan badan pengurus, penentuan tugas dan tanggung jawab anggota, serta pengembangan aturan dan prosedur yang mengatur operasional kelompok. Pendekatan administratif membantu dalam membangun struktur organisasi yang efisien dan memfasilitasi koordinasi dan kerjasama antara nelayan.

2. Perencanaan dan pengelolaan sumber daya: Pendekatan administratif melibatkan penggunaan teknik perencanaan dan pengelolaan dalam konteks kegiatan nelayan. Ini melibatkan identifikasi tujuan jangka pendek dan jangka panjang, alokasi sumber daya (seperti peralatan, tenaga kerja, dan anggaran), serta pengembangan rencana tindakan yang terarah. Melalui perencanaan yang baik, nelayan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dan merumuskan strategi pengelolaan yang berkelanjutan.
3. Pengawasan dan evaluasi: Pendekatan administratif mencakup pengawasan dan evaluasi sebagai mekanisme untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja nelayan dalam mencapai tujuan. Ini melibatkan pembuatan sistem pengawasan yang memungkinkan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan, penilaian kualitas hasil kerja, dan identifikasi masalah atau tantangan yang perlu diatasi. Evaluasi secara periodik juga membantu dalam mengevaluasi dampak dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan terhadap kesejahteraan nelayan dan peningkatan kapasitas mereka.

Dengan menerapkan pendekatan administratif dalam pemberdayaan nelayan, dapat menciptakan kerangka kerja yang terstruktur, efisien, dan efektif dalam mendukung pengelolaan sumber daya perikanan, pengembangan mata pencaharian yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi nelayan.

## **PENUTUP**

Proses pemberdayaan masyarakat melibatkan memberikan akses, pengetahuan, keterampilan, sumber daya, dan dukungan kepada individu dan komunitas agar mereka dapat mengambil peran aktif dalam mengatasi tantangan dan meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik di lingkungannya. Pemberdayaan masyarakat juga berfokus pada memperkuat posisi masyarakat dalam menghadapi ketidakadilan, ketimpangan, dan penindasan dengan

memberikan mereka kontrol atas sumber daya, keputusan, dan pengetahuan yang dapat meningkatkan keberdayaan mereka.

Dengan memperkuat masyarakat dan memberikan mereka kemampuan untuk mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan dan perubahan sosial, pemberdayaan masyarakat berpotensi menciptakan transformasi yang berkelanjutan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan memberdayakan masyarakat pesisir pantai melalui penguatan kapasitas, akses terhadap pendidikan dan keterampilan, serta partisipasi dalam pengelolaan sumber daya, kita dapat membangun masyarakat yang berkelanjutan dan tangguh di wilayah pesisir pantai. Ini melibatkan pendekatan yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dan perlindungan sumber daya pantai, seperti perikanan, mangrove, dan habitat laut lainnya.

Penguatan kapasitas organisasi masyarakat juga dapat membantu mereka dalam mengadvokasi kepentingan mereka kepada pemerintah dan pihak terkait lainnya, serta memperoleh akses ke sumber daya dan program pembangunan yang relevan. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat pesisir pantai dapat mengatasi tantangan yang mereka hadapi, memperbaiki kondisi hidup mereka, dan menjadi agen perubahan yang berkelanjutan dalam mengelola dan melindungi lingkungan pesisir pantai yang berharga.

Dalam konteks nelayan, pendekatan kolaboratif melibatkan kerjasama antara nelayan sendiri, pemerintah, peneliti, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Dengan melibatkan nelayan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi kebijakan pengelolaan perikanan, pendekatan kolaboratif memungkinkan penggabungan pengetahuan tradisional dan ilmiah untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dalam pendekatan kolaboratif, pihak-pihak yang terlibat saling berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman mereka, serta bekerja bersama untuk mencari solusi yang efektif dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan perikanan.

Dengan memahami ekosistem secara menyeluruh, nelayan dapat membuat keputusan yang lebih bijak tentang waktu dan lokasi penangkapan ikan, serta mengurangi dampak negatif terhadap spesies dan habitat yang rentan. Nelayan dapat berpartisipasi dalam survei dan pemantauan sumber daya perikanan, berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka, serta berkontribusi dalam pengembangan kebijakan dan tindakan pengelolaan. Pendekatan ini membantu nelayan dalam membangun mata pencaharian yang berkelanjutan, melindungi sumber daya yang mereka andalkan, dan memastikan kelangsungan hidup ekosistem perairan bagi masa depan.

Perencanaan melibatkan penilaian yang cermat terhadap situasi dan kondisi saat ini, identifikasi tujuan yang jelas, dan pemikiran yang sistematis tentang cara mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk merumuskan langkah-langkah yang akan diambil guna mencapai hasil yang diinginkan dalam waktu yang ditentukan. Perencanaan yang efektif memungkinkan pengaturan prioritas yang tepat, alokasi sumber daya yang efisien, dan pengelolaan risiko yang baik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pendekatan perencanaan dalam pemberdayaan nelayan melibatkan penggunaan metode dan proses perencanaan yang berfokus pada kebutuhan, partisipasi, dan penguatan nelayan sebagai pihak yang terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya perikanan dan pengembangan mata pencaharian mereka. Nelayan diberi kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka, serta berkontribusi dalam merumuskan tujuan, strategi, dan tindakan yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Melalui perencanaan yang baik, nelayan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dan merumuskan strategi pengelolaan yang berkelanjutan.

Dengan menerapkan pendekatan administratif dalam pemberdayaan nelayan, dapat menciptakan kerangka kerja yang terstruktur, efisien, dan efektif dalam mendukung pengelolaan sumber daya perikanan, pengembangan mata

pencaharian yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi nelayan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Darmaningrum, K. T. (2021). Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir dengan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP). *Islamic Management and Empowerment Journal*, 3(2), 133–150. <https://doi.org/10.18326/imej.v3i1.133-150>
- Fitriansah, H. (2012). Keberlanjutan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kwala Lama Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 8(4), 360. <https://doi.org/10.14710/pwk.v8i4.6492>
- Gusti Ayu Yogi Iswari, I., Indrayani, L., & Rai Suwena, K. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi di Dusun Pangkung Dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya. *Pendidikan Ekonomi*, 11(2), 509–516.
- Hafsaridewi, R., Khairuddin, B., Ninef, J., Rahadiati, A., & Adimu, H. E. (2019). Pendekatan Sistem Sosial – Ekologi Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 4(2), 61–74. <https://doi.org/10.15578/marina.v4i2.7389>
- Indarti, I., & Wardana, D. S. (2013). Metode Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. *BENEFIT Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 17(1), 75–88.
- Nugroho, M. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Pasuruan : Kajian Pengembangan Model Pemberdayaan. *Jurnal Teknologi Pangan*, 6(1), 19–26. <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/Teknologi-Pangan/article/view/464/361>
- Prapti, K. P., & Betiri, M. (2021). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Jember Coastal Community Empowerment Strategy in Jember Regency resources ). Sejumlah desa pesisir di selatan Jawa Timur merupakan obyek pembangunan dan pengembangan yang Komoditas perikanan tangkap di. *Journal of Aquaculture Science*, 6(Spesial), 251–265.
- Sjafari, A., Nugroho, K. S., Arenawati, Otaviana, O., & Fernanto, G. (2018). Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Provinsi Banten : Studi Kasus di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dan Desa Citeurep Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 2(1), 1–12.
- Sufi, S. (2019). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pesisir Gampong Keude Bungkhai Kecamatan Muara Batu Aceh Utara. *Negotium: Jurnal Ilmu*

*Administrasi Bisnis*, 2(2), 106. <https://doi.org/10.29103/njiab.v2i2.3030>

Sutarto, D. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Keluarga Persepektif Gender. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 267. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1473>

Suwandi, M. A. (2020). Membangun Keberdayaan Nelayan: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui “Kelompok Usaha Bersama Berkah Samudra” di Jepara, Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(2), 231–255.

Utina, R. (2012). Kecerdasan Ekologis Dalam Kearifan Lokal Masyarakat Bajo Desa Torosiaje Provinsi Gorontalo. *Prosiding Konferensi Dan Seminar Nasional Pusat Studi Lingkungan Hidup Indonesia Ke 21*, 5(September), 14–20.